



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8997-9003

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah

Ahmidi^{1✉}, Alhamdani², Surya Sukti³

IAIN Palangka Raya

Email: ahmidiartikel@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pada masa Ibnu Taimiyah, dunia Islam sedang mengalami keruntuhan. Ia melihat tanda-tanda keruntuhan politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak. Artikel ini bertujuan untuk menggali paradigma yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam memberikan pandangan tentang konsep negara dan pemimpin. Penggunaan metode kepustakaan juga dilakukan dalam mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa untuk menegakkan agama dan dunia harus ada pemerintahan, yang tentu didalamnya ada negara dan pemimpin sebagai wakil tuhan di bumi. konsep negara dalam perspektif Ibnu Taimiyah menekankan penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan yang ada, ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah mempunyai paradigma integralistik, di mana agama dan negara tidak dapat diisahkan dan merupakan satu-kesatuan yang utuh.

Kata Kunci: *Negara, Paradigma, Pemimpin*

Abstract

At the time of Ibn Taymiyyah, the Islamic world was experiencing a collapse. He saw signs of political collapse, social dislocation, and moral decadence. This article aims to explore the paradigm used by Ibn Taymiyyah in providing views on the concept of state and leader. The use of literature method is also done in collecting relevant data for this research. The results show that Ibn Taymiyyah argues that to uphold religion and the world there must be a government, which of course includes the state and the leader as God's representative on earth. the concept of the state in the perspective of Ibn Taymiyyah emphasizes the application of Islamic law in the existing government system, this shows that Ibn Taymiyyah has an integralistic paradigm, where religion and the state cannot be separated and are one whole.

Keywords: *State, Paradigm, Leader*

PENDAHULUAN

Ibnu Taimiyah dikenal sebagai ulama besar Mazhab Hambali dengan kecerdasan dan kejeniusannya, namun perjalanan hidupnya yang mencakup bidang pendidikan, politik, dan keilmuan, menjadi latar belakang yang penting untuk dipahami. Dalam pengabdian awalnya, Ibnu Taimiyah berhasil menyelesaikan berbagai mata pelajaran dan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu yang terbaik di antara sesama murid (Megawati M, 2022, pp. 7–8). Namun, kehidupan Ibnu Taimiyah tidak terbatas pada ranah akademis. Terlihat bahwa peran politiknya mengundang perhatian, termasuk tawaran jabatan kepala kantor pengadilan yang menandai perhatian pemerintah terhadap keahliannya. Namun, penolakan Ibnu Taimiyah terhadap tawaran tersebut menggambarkan integritas moral dan prinsip-prinsipnya yang tidak tergoyahkan (Latif, 2024).

Tantangan yang dihadapi Ibnu Taimiyah semakin kompleks ketika dia terlibat dalam dunia politik dan urusan publik. Pemikiran revolusionernya terkait dengan gerakan tajdid dan ijtihad dalam bidang muamalah menciptakan kontroversi di kalangan masyarakat dan pemerintahan (Raharjo et al., 2024, p. 102). Bahkan, sejarah mencatat bahwa Ibnu Taimiyah mengalami masa tahanan (MAKNA & AL-QUR'AN DAN, 2024, p. 208) akibat fitnah yang dilontarkan oleh lawan-lawannya. Ini mencerminkan betapa besar perlawanan terhadap pemikiran dan pandangannya. Ibnu Taimiyah menunjukkan konsep negara dan kepemimpinan yang sangat terkait dengan kondisi sosial dan politik zamannya. Dunia Islam pada masa itu mengalami kemunduran, dan Ibnu Taimiyah mencermati gejala disintegrasi politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak (Juliandi & Khairuddin, 2024, p. 109). Pemahaman konsep negara dan kepemimpinan Ibnu Taimiyah menjadi relevan untuk memahami dinamika tersebut.

Konsep Ibnu Taimiyah terhadap negara tidak hanya terbatas pada istilah khilafah tradisional atau teori imamah mutlak. Sebaliknya, ia menekankan penerapan syariat Islam sebagai dasar utama pemerintahan. Melalui pemikirannya, Ibnu Taimiyah menciptakan argumen rasional (Ridho et al., 2024, p. 227) dan memperkuatnya dengan landasan Sunah Nabi untuk menunjukkan perlunya suatu kepemimpinan yang mendasarkan pada nilai-nilai Islam. Berdasarkan pembahasan mengenai pemerintahan dalam pandangan Ibnu Taimiyah, kita melihat bahwa konsep ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga terkait erat dengan pelaksanaan syariat Islam dalam sistem pemerintahan.

Dengan menyoroiti pendekatan akal dan hadis, Ibnu Taimiyah menggambarkan bahwa kepemimpinan adalah tugas suci yang diwajibkan oleh agama. Namun, penafsiran terhadap konsep negara dan kepemimpinan Ibnu Taimiyah perlu dipelajari lebih lanjut untuk memahami secara mendalam bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam konteks zaman sekarang, dan bagaimana relevansinya dengan tantangan dan dinamika sosial-politik yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba fokus kepada bagaimana konsep negara maupun kepemimpinan dalam perspektif Ibnu Taimiyah, yang bertujuan agar mendapatkan penjelasan yang komprehensif terhadap paradigma apa yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang melibatkan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan berbagai sumber daya yang ada di perpustakaan, seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang serupa, artikel, catatan, dan berbagai jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian. Metode sistematis juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data untuk memecahkan masalah (Sari & Asmendri, 2020, p. 44).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah yang bernama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Hali lahir di kota Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H) (Yanti, n.d.). Ia berasal ulama besar Mazhab Hambali dan penulis sejumlah buku. Berkat kecerdasan dan kejeniusannya, Ibnu Taimiyah yang masih berusia sangat muda telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran, seperti tafsir, hadis, fiqih, matematika, dan filsafat serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya (Anita, 2019). Guru Ibnu

Taimiyah berjumlah 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin Al Maqdisi, Ahmmad bin Abu Al Khair, Ibnu Abi Al Yusr dan Al Kamal bin Adul Majd bin Asakir (NURFAIZAH, 2022). Ketika berusia 17 tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya yaitu Syamsuddin Al-Makdisi, untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah (Muhibuddin, 2022).

Ibnu Taimiyah tidak hanya terkenal karena kepiawaiannya dalam menulis dan berpidato, tetapi juga karena keberaniannya dalam berperang di medan perang. Sebagian orang iri dan berusaha menjatuhkan Ibnu Taimiyah karena pemikirannya yang revolusioner, seperti gerakan tajdid (pembaharu) dan ijtihadnya dalam bidang muamalah. Sejarah mencatat bahwa sepanjang hidupnya, Ibnu Taimiyah telah menjalani masa tahanan sebanyak empat kali akibat fitnah yang dilontarkan para penentangannya (Salim et al., 2021). Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1284, Ibnun Taimiyyah yang baru berusia 21 tahun menjabat sebagai guru dan khatib di masjid-masjid dan memulai karir sebagai teolog yang aktif yang kontroversial. Dikenal sebagai seorang pemikir, Ibnu Taimiyah memiliki intuisi yang tajam, berpikir dan berpikiran bebas, setia pada kebenaran, dan lebih dari itu, berani dan tekun, ia semua memenuhi persyaratan, yang membuat orang luar biasa (Siregar et al., 2024).

Selama dalam tahanan, Ibnu Taimiyah tidak pernah berhenti untuk menulis dan mengajar (Anita, 2019). Ibnu Taimiyah bahkan tetap menulis dengan batu arang bahkan ketika hak menulisnya dicabut. Pada tanggal 26 September 1328 M (20 Dzul Qaidah 728 H), Ibnu Taimiyah meninggal dunia di penjara setelah mendapatkan perawatan yang kejam selama lima bulan. Pada usia yang sangat muda, Ibnu Taimiyah belajar yurisprudensi (fiqh), hadis nabi, tafsir al-Qur'an, matematika, dan filsafat.

Konsep Negara dan Kepemimpinan Ibnu Taimiyah

Dunia Islam pada masa Ibnu Taimiyah hidup sedang mengalami kemunduran (Bakry et al., 2021). Kemunduran tersebut ditandai dengan puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak serta moral. Pada saat itu hanya dinasti Mamaliklah satu-satunya kekuatan di dunia Islam. Pada bagian Timur dinasti ini semua negeri telah ditaklukkan dan diduduki oleh orang-orang mongol (Suharti, 2016). Sementara itu, pada masa Ibnu Taimiyah orang-orang Mongol ini telah memeluk agama Islam, tetapi keislaman mereka hanya sekedar formalitas, karena mereka masih terus menghancurkan negeri-negeri Islam beserta penduduknya. Sedang di negeri-negeri lain di luar dunia Islam ini, dimana

terdapat penduduk yang beragama Islam, kaum muslimin terpecah pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang terus-menerus saling berperang.

Di dalam alquran dan hadist (Tawwab et al., 2024, p. 46) tidak ada ayat atau teks yang secara eksplisit membahas konsep negara. Namun, ada beberapa ayat atau teks yang membahas prinsip-prinsip bernegara, seperti keadilan (QS. 5:8), musyawarah (QS. 42:38), perdamaian dan persaudaraan (QS. 49:10), keamanan (QS. 2:126), dan persamaannya (QS. 16:97). Ini tidak berarti alquran tidak mengajarkan cara bernegara yang baik. Islam hanya memberikan prinsip-prinsip dasar yang umum, dan manusialah yang harus menafsirkan dan berbicara tentang konsep negara karena diskusi ini terus berlanjut, memungkinkan terciptanya formula baru untuk konsep ini dalam menjaga kesejahteraan rakyatnya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa berkolaborasi atau berkelompok untuk mewujudkan kepentingan bersama adalah boleh dalam hal ini negara; Namun, dia berpendapat bahwa berkolaborasi untuk memelihara kapasitas alam adalah suatu keharusan. Teori tentang lembaga negara bermula dari pemikiran ini, ia menekankan betapa pentingnya institusi untuk menciptakan masyarakat yang mengalami keadilan (Rahmatullah & Hamidah, 2021, p. 345).

Akal dan hadis adalah dasar pemikiran Ibnu Taimiyah tentang kebutuhan manusia untuk negara. Argumen rasionalnya adalah bahwa setiap orang harus bergabung, bekerja sama, dan menikmati keuntungan dari kepemimpinan, tanpa memandang agama mereka. Beberapa landasan dari Sunah Nabi Muhammad juga memperkuat argumentasi rasional. Dalam *al-Siyāṣah al-Syar'īyyah*, penegakan negara dianggap sebagai tugas suci yang diwajibkan oleh agama dan merupakan cara untuk mendekatkan manusia kepada Allah. (Hajani, 2020) Mendirikan suatu negara berarti memberikan fungsi yang signifikan untuk menegakkan keadilan, karena menegakkan keadilan berarti melakukan peraturan, menghindari perbuatan jahat, memasyarakatkan tauhid, dan mempersiapkan masyarakat yang hanya mengabdikan kepada Allah. Akidah, akhlak, kebudayaan, dan tradisi sosial dibangun, selain mengubah struktur dan fondasi masyarakat (Bakry et al., 2021, pp. 11–12)

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa pembentukan negara lebih bergantung pada proses interaksi sosial. Dengan kata lain, Islam, berdasarkan Al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak memberikan perintah langsung untuk mendirikan negara. Selain itu, dia menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah mendukung pemerintahan sekuler hanya karena dia tidak mengatakan bahwa negara adalah bagian dari agama atau iman. Berbagai pihak sering menggunakan gagasan ini sebagai alasan untuk mendirikan negara yang sekuler atau tidak berbasis agama. Padahal, pendapat ini sangat berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah sendiri.

Beliau menyatakan, "*Anna wilāyata amra al-nās min a'zhami wājibāti al-dīn*", yang berarti bahwa menjaga kepentingan manusia dan membangun pemerintahan adalah kewajiban yang sangat penting dalam agama. Bahkan menurut pandangan Ibnu Taimiyah, menegakkan agama dan dunia memerlukan pemerintahan. Menurut Ibnu Taimiyah, "*Lā qiyāma li al-dīn wa lā li al - dun-yā illā bi al-wilāyah*" berarti agama dan negara tidak dapat ditegakkan kecuali dengan adanya pemerintahan atau negara. Hal ini karena kemaslahatan manusia tidak akan sempurna tanpa perkumpulan atau pengelolaan untuk memenuhi kebutuhannya, yang membutuhkan seorang pemimpin (Ash-Shufi et al., 2021, p. 58).

Dari beberapa pernyataan di atas, konsep negara dalam perspektif Ibnu Taimiyah menekankan penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan yang ada (Sinaga & Desiandri, 2024, p. 972), tetapi bukan untuk menjatuhkan sistem yang ada untuk menggantinya dengan Khalifah. Dalam hal ini juga penulis berpendapat bahwa tugas negara menurut Ibnu Taimiyah, untuk menciptakan kemaslahatan bersama dan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat, negara di sini berfungsi sebagai alat untuk mencapai kebaikan umat manusia. Sehingga bisa disimpulkan bahwa konsep negara menurut Ibnu Taimiyah ini sejalan dengan paradigma Integralistik yang menganggap politik dan Islam tidak dapat dipisahkan atau Islam dan negara tidak dapat dipisahkan.

Menurut Ibnu Taimiyah, otoritas raja atau pemimpin juga pemerintah hanya diberikan oleh Tuhan kepada hamba hamba yang dia pilih. Ibnu Taimiyah, berbicara tentang pelanggaran terhadap amanat rakyat, berpendapat bahwa pemimpin yang korup adalah yang paling tidak bermoral dan karena itu tidak ada alasan untuk patuh pada mereka. Dia juga menyalahkan para ulama dan cendekiawan yang mendukung pemimpin yang menyimpang dari agama dan melakukan kesalahan. Prinsip utama dari teori Ibnu Taimiyah adalah bahwa sebagai muslim, stabilitas diperlukan dalam interaksi sosial. "*Hidup selama 60 tahun diperintah oleh pemimpin yang zalim masih lebih baik daripada hidup satu hari tanpa pemerintahan,*" kata Ibnu Taimiyah (Pradana, 2023, p. 61).

Islam tidak hanya memerintahkan kepemimpinan, tetapi pada dasarnya memerintahkan perilaku yang baik, keadilan, keteraturan, membantu mereka yang teraniaya, dan melaksanakan hukum. Pemimpin memiliki kemampuan untuk memberi perintah. Pemimpin harus bercita-cita seperti Islam, yang berarti mereka adalah wali atau wakil Tuhan. Seorang pemimpin tidak hanya memimpin suatu negara, tetapi juga ditugaskan oleh Allah untuk menegakkan ajaran Islam dan menganggap negara sebagai amanah suci dari Allah (Sulistyaningrum, 2023, p. 21).

Dengan demikian Ibnu Taimiyah menyatakan jika pada kelompok yang sedemikian kecil dipilih pemimpin, maka pada kelompok yang lebih besar dia berstatus masyarakat serta lebih di utamakan dan peluang adanya seorang pemimpin untuk mengatur tata dan kehidupan sosial dalam sebuah masyarakat (Ash-Shufi et al., 2021).

SIMPULAN

Pokok inti pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai konsep negara dan kepemimpinan adalah bahwa ia menekankan pentingnya berkolaborasi atau berkelompok untuk kepentingan bersama (negara), dimana pemikiran Ibnu Taimiyah ini sejalan dengan paradigma Integralistik. Pemimpin harus memiliki cita-cita seperti Islam menurut Ibnu Taimiyah, yang berarti mereka adalah wali atau wakil Tuhan. Mereka juga diberi tugas oleh Allah untuk menegakkan ajaran Islam di seluruh negeri mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, D. (2019). Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Terhadap Regulasi Harga Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Islam*, 3(1), 39–64.
- Ash-Shufi, C. G. F., Mulyana, A., & Fadhlil, F. D. (2021). KONSEP PEMIMPIN ADIL IBNU TAIMIYAH DAN RELEVANSINYA DENGAN DEMOKRASI INDONESIA. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 17(1), 52–68.
- Bakry, K., Abbas, A. H., & Hamid, A. N. (2021). Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah). *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 7(1), 1–19.
- Hajani. (2020). Dimensi Legalitas Moral Dan Rasionalitas Politik Islam Dalam Objektivitas Negara. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 141–166. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3351>
- Juliandi, B., & Khairuddin, M. K. (2024). Distribusi Harta Milik Negara Perspektif Ibn Taimiyah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(1), 107–122.
- Latif, M. A. (2024). PENGERTIAN ETIKA POLITIK SERTA PENDAPAT IBNU TAIMIYAH. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 4(1), 11–20.
- MAKNA, A. P. I. T. T., & AL-QUR'AN DAN, H. (2024). *Jurnal Pengetahuan Islam*.
- Megawati M, M. M. (2022). *Konsep Utang Menurut Pemikiran Ibnu Taimiyah dan Muhammad Sharif Chaudry*. IAIN Parepare.
- Muhibuddin. (2022). IMAM IBNU TAIMIYAH (KEHIDUPAN, PEMIKIRAN, DAN WARISANNYA). *Spektra: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4(2), 100–131.

<https://doi.org/10.34005/spektra.v4i2.3123>

- NURFAIZAH, K. (2022). INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENENTUKAN HARGA MENURUT IBNU TAIMIYAH. *JURNAL AL-TSARWAH*, 5(1), 7823–7830.
- Pradana, M. (2023). *KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK IBNU TAIMIYAH)*. S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ.
- Raharjo, T., Khorida, A. R., Febriyanti, Y., & Jannah, M. (2024). Muhammadiyah dan Politik 2024. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(2), 99–109.
- Rahmatullah, P., & Hamidah, T. (2021). Pemikiran Politik dan Negara Ibnu Taimiyah: Studi Pendudukan Taliban atas Pemerintahan Afghanistan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2), 341–350.
- Ridho, M. M., Sulthoni, A., & Saputra, A. (2024). RELEVANSI FILSAFAT ETIKA IBNU TAIMIYAH DALAM PENGEMBANGAN HUKUM MODERN. *Prosiding Seminar Internasional Peluang Dan Tantangan Perguruan Tinggi Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0*, 1(1), 222–237.
- Salim, A., Muharir, M., & Hermalia, A. (2021). Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar dan Hak Milik. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 155–166. <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>
- Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science*, 6(1), 41–53.
- Sinaga, H. A., & Desiandri, Y. S. (2024). Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 967–973.
- Siregar, R. M. M., Damanik, N., & Kamal, A. (2024). KEPEMIMPINAN NON MUSLIM MENURUT TAFSIR IBNU TAIMIYAH. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(3), 53–63.
- Suharti. (2016). Teori Politik Ibn Taimiyah dan Relevansinya di Era Modern. *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 2 (2)(2), 59–75.
- Sulistyaningrum, R. A. (2023). Kepemimpinan Sufistik Menurut Perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. *Spiritualita*, 7(1), 14–25.
- Tawwab, M. A., Kara, M., Mase, R. A., Nahlah, N., & Arifin, A. (2024). Islamic Economics in the View of Ibnu Taimiyah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 45–54.
- Yanti, T. J. dkk. (n.d.). *SEJARAH PEMIKIRAN ISLAM IBNU TAIMIYAH*. 7823–7830.